

DINAMIKA KEMISKINAN RUMAH TANGGA

Tri Bastuti Purwantini dan I Wayan Rusastra

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa, oleh karena itu penanganan dalam pengentasan kemiskinan sangat mendesak untuk dilakukan. Menurut Bappenas (2012), komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan komitmen negara untuk menyejahterakan rakyatnya sekaligus menyumbang pada kesejahteraan masyarakat dunia. Sesuai dengan kesepakatan dalam MDGs bahwa tingkat kemiskinan ditargetkan menurun 50%, yakni menjadi 7,5% pada tahun 2015 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1990 (15,1%). Tingkat kemiskinan di sini diukur dengan menggunakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan mengacu pada data Susenas yang dikeluarkan oleh BPS pada waktu tertentu, sehingga garis kemiskinan tersebut relatif/dinamis. Dalam MDGs juga diungkapkan bahwa, indeks kedalaman kemiskinan juga ditargetkan harus menurun, kondisi tahun 1990 nilai indeks kedalaman kemiskinan lebih dari 4%, walau tidak secara implisit berapa besaran penurunannya.

Bila menggunakan kriteria garis kemiskinan absolut internasional, yakni dengan garis kemiskinan US\$1 PPP (*purchasing power parity*/paritas daya beli) per kapita per hari, maka tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 harus menurun maksimal menjadi 10,3% di mana kondisi pada tahun 1990 mencapai 20,6%. Kondisi ini sudah tercapai, data empiris menunjukkan bahwa pada tahun 2008 proporsi penduduk yang berpendapatan di bawah US\$1 PPP per kapita per hari mencapai 5,9% (Bappenas, 2012). Namun apabila menggunakan standar US\$2 PPP kinerja tingkat kemiskinan masih belum tercapai. Secara umum dapat diungkapkan bahwa garis kemiskinan dengan acuan BPS secara nasional lebih tinggi dibanding dengan standar US\$1 PPP, sebaliknya bila menggunakan US\$2 PPP, cenderung lebih rendah. Implikasi indikator tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dengan kriteria US\$1 PPP cenderung lebih sedikit dibanding dengan menggunakan kriteria nasional dan sebaliknya bila menggunakan indikator US\$2 PPP, jumlah penduduk miskin lebih besar.

Berdasarkan acuan BPS dengan kriteria pengeluaran minimal untuk pangan dan nonpangan dari data Susenas (BPS, 2014a), terlihat selama sepuluh tahun terakhir (2003–2013) tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun baik secara absolut maupun relatif, namun sampai dengan akhir tahun 2013 kondisi kemiskinan masih memprihatinkan dan masih jauh dari yang ditargetkan MDGs. Bappenas menganalisis target penurunan kemiskinan tahun 2015 masih taraf lampu kuning belum tercapai (Bappenas, 2012). Penurunan tersebut tentunya merupakan keberhasilan dari berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan data dan pengukuran kemiskinan yang baik, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan. Namun demikian, permasalahan

dan tantangan dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan masih belum teratasi. Berbagai rencana aksi dan program pengentasan kemiskinan baik yang berbasis individu atau rumah tangga, masyarakat, maupun UMKM sampai saat ini masih dilaksanakan, berbagai kendala dan masalah banyak ditemui dalam implementasi di lapang. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan paradigma pendekatan yang tepat dalam pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang tidak henti-hentinya dibicarakan dan diupayakan pengentasannya. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif. Di sisi lain, permasalahan kemiskinan, sangat berkaitan erat dengan budaya kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, tidak ada kepakaran (*skill*), akses permodalan, terbatasnya lapangan pekerjaan, lingkungan sosial dan alam di mana manusia berada, serta struktur kekuasaan yang menjalankan pemerintahan (Umar, 2012). Oleh karena itu, tercapainya pengentasan kemiskinan dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.

Akibat adanya budaya kemiskinan di kalangan orang-orang miskin, maka mereka seolah terbelenggu dengan kemiskinan itu sendiri sehingga muncul kepasrahan, kemalasan, ketidakberdayaan, keterasingan, dan sebagainya. Selain itu, permasalahan lain orang-orang miskin ialah tidak ada pendidikan, maka otomatis tidak ada kepakaran (keahlian). Konsekuensinya, tidak bisa bersaing dalam lapangan pekerjaan dan dunia usaha. Mengingat akar permasalahan kemiskinan beragam, program pengentasan kemiskinan harus memerhatikan akar permasalahan kemiskinan dan potensi sumber daya wilayah kemiskinan (Faharuddin, 2012).

Tujuan tulisan ini secara umum untuk memotret profil dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Secara khusus tulisan ini memuat beberapa aspek bahasan antara lain (1) perkembangan penduduk miskin baik absolut maupun secara relatif berdasarkan garis kemiskinan nasional (BPS); (2) menganalisis perkembangan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta faktor-faktor yang memengaruhinya; (3) menganalisis berbagai program pengentasan kemiskinan: kinerja, permasalahan, dan antisipasi ke depan; dan (4) menganalisis paradigma dan strategi pendekatan pengentasan kemiskinan.

METODE ANALISIS

Kerangka Pemikiran dan Pendekatan

Dalam membahas kemiskinan tentunya harus paham dengan apa definisi dan kemiskinan yang digunakan. World Bank (2002) seperti yang dikutip oleh Surjono (2013) mendefinisikan kemiskinan dilihat dari tiga aspek. *Pertama*, dikaitkan dengan apa yang pada umumnya dimaknai sebagai miskin, baik individu maupun keluarga di mana mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsep ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap

pendapatan, konsumsi, pendidikan atau atribut lainnya dari 'si miskin' dengan ambang batas yang telah didefinisikan, sehingga bisa dikategorikan bahwa yang bersangkutan miskin untuk atribut tertentu. *Kedua*, adalah aspek yang terkait dengan ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan, konsumsi, atau atribut lainnya yang ada dalam populasi. Aspek ini didasarkan pada premis bahwa posisi relatif seseorang/keluarga dalam masyarakat adalah merupakan aspek penting dari tingkat kemakmuran mereka. Selanjutnya, tingkat ketimpangan dalam kelompok populasi, wilayah atau negara, baik dari dimensi moneter maupun nonmoneter, mencerminkan ringkasan indikator dari tingkat kemakmuran kelompok tersebut. *Ketiga*, adalah aspek yang terkait dengan dimensi kerentanan yang didefinisikan sebagai probabilitas atau risiko saat ini untuk menjadi miskin atau justru jatuh ke tingkat kemiskinan yang lebih dalam pada suatu titik di masa mendatang. Kerentanan adalah kunci dimensi kemakmuran karena memengaruhi perilaku individu (berkenaan dengan investasi, pola produksi, strategi) dan persepsi terhadap situasi mereka sendiri.

Data dan Analisis Data

Data utama dalam penulisan ini adalah dari data sekunder yang bersumber dari BPS series tahun 2003–2013 (BPS, 2014a), namun untuk aspek tertentu hanya menganalisis beberapa tahun. Khusus untuk data tahun 2011–2013, data kemiskinan yang dianalisis adalah kondisi Maret masing-masing tahun tersebut. Hal ini menyesuaikan pada data tahun sebelumnya yang dilakukan satu kali setahun, yakni pada bulan Februari/Maret. Selain itu, juga digunakan data dari berbagai sumber terkait seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bappenas, dan sebagainya, serta *review* berbagai sumber terbitan. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan tabel-tabel dan grafik.

KERAGAAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA NASIONAL

Bahasan kemiskinan dalam tulisan ini fokus pada aspek pertama dengan menggunakan batas garis kemiskinan menurut BPS. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (yang disetarakan dengan 2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan (kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Konsep dasar kemiskinan dengan indikator tersebut juga digunakan negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia (Surjono, 2013).

Laju penurunan jumlah penduduk miskin lebih besar di perdesaan dibanding perkotaan, dan sebaliknya secara relatif penurunan proporsi penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibanding di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, pembangunan yang berbasis perdesaan harus lebih ditingkatkan. Di sisi lain,

berdasarkan data BPS dapat diproyeksikan bahwa proporsi penduduk di perkotaan akan semakin besar dibanding di wilayah perdesaan. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2035 sekitar 66,6% penduduk tinggal di perkotaan. Dengan semakin tingginya tingkat urbanisasi, maka perlu dicermati bahwa penduduk yang melakukan urbanisasi sebagian besar adalah yang bekerja di sektor nonformal. Dengan demikian, dikhawatirkan penduduk miskin di perkotaan akan semakin besar.

Analisis secara intertemporal menunjukkan bahwa terjadi perlambatan penurunan jumlah dan proporsi penduduk miskin menurut wilayah (desa dan kota) atau secara agregat nasional. Dalam periode 2003–2008, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan sebesar -1,04%/tahun, di mana dalam periode berikutnya mengalami perlambatan menjadi hanya 0,86%/tahun. Hal yang sama juga terjadi di perdesaan yang mengalami perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,25%/tahun menjadi 1,11%/tahun. Secara agregat nasional (desa+kota) terjadi perlambatan penurunan dari 1,18%/tahun (2003–2008) menjadi 1,02%/tahun (2009–2013). Secara relatif, proporsi penduduk miskin agregat nasional juga mengalami perlambatan penurunan, yaitu dari 1,44%/tahun menjadi 1,40%/tahun dalam dua periode analisis (Tabel 1). Jika mengacu pada target pengentasan kemiskinan sebesar 50% dengan mengacu basis data tingkat kemiskinan 1990 sebesar 15,0%, maka sasaran penurunan tingkat kemiskinan 25 tahun kemudian (2015) adalah sebesar 7,5% (target MDGs Indonesia). Berdasarkan pada tingkat kemiskinan agregat nasional 2013 sebesar 11,37% dengan laju penurunan 1,40%/tahun, maka tingkat kemiskinan 2015 diperkirakan sebesar 11,05%, jauh dari sasaran awal MDGs yang besarnya 7,50%. Tantangannya adalah perumusan dan implementasi strategi, kebijakan, dan program pengentasan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran.

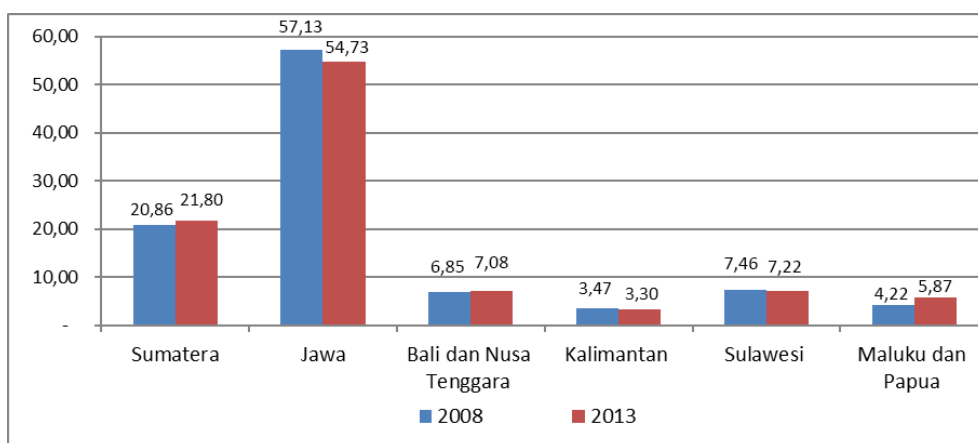
Penyebaran penduduk miskin di Indonesia lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa dibanding luar Jawa. Hal ini antara lain karena penduduk Indonesia dominan tinggal di Jawa sementara sumber daya alam pendukungnya semakin merosot baik jumlah maupun kualitasnya. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, maka penduduk miskin juga mulai menyebar di luar Jawa. Ilustrasi pada Gambar 1 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (2008–2013) proporsi penduduk miskin yang tinggal di Jawa berkurang -2,4%. Namun demikian, mengingat jumlah penduduk di Jawa padat, maka pengurangan proporsi tersebut tidak menggeser kontribusi penduduk di Pulau Jawa, sementara di Sumatera justru meningkat 0,94%.

Bila dilihat secara nominal, secara agregat jumlah penduduk miskin menurun selama tahun 2008–2013, kecuali di Provinsi Maluku dan Papua, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan yang meningkat masing-masing 29,25 ribu (30,8%) dan 141,67 ribu (10,3%) penduduk miskin atau secara agregat meningkat rata-rata 11,6% selama lima tahun terakhir. Terkesan bahwa percepatan pembangunan yang diprogramkan Pemerintah selama ini di wilayah tersebut masih belum berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian faktor dan permasalahan apa yang menghambat keberhasilan program pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Secara rinci perkembangan jumlah penduduk miskin menurut pulau dan wilayah di Indonesia, tahun 2008 dan 2013 disajikan pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah dan Proporsi Penduduk Miskin Menurut Wilayah di Indonesia, 2003–2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)			% Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49
2012	10,65	18,48	29,13	8,78	15,12	11,96
2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37
Pertumbuhan (%)						
2003–2008	-1,04	-1,25	-1,18	-1,45	-1,40	-1,44
2009–2013	-0,86	-1,11	-1,02	-1,30	-1,46	-1,40
2003–2013	-1,38	-3,30	-2,68	-4,47	-3,28	-4,05

Sumber: BPS (2014a), diolah



Sumber: BPS (2008, 2014)

Gambar 1. Perkembangan Proporsi Penyebaran Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia, 2008 dan 2013 (%)

Tabel 2 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di kota nasional menurun -19,1%. Bila dilihat antarpulau persentase penurunan tertinggi ditemukan di Kalimantan (32,1%). Namun demikian, walaupun penurunan secara

relatif rendah, secara nominal pengurangan tersebut cukup tinggi karena jumlah absolut insiden kemiskinan tinggi. Hanya Pulau Maluku dan Papua yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Walaupun secara absolut jumlah penduduk di wilayah ini rendah, namun perlu diwaspadai karena peningkatan secara persentase cukup tinggi (30,9%). Kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin harus diwaspadai. Hal ini terkait juga dengan Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini digulirkan untuk percepatan pembangunan di wilayah ini. Optimalisasi pembangunan belum menyentuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. Perkembangan Penduduk Miskin Wilayah Perkotaan Menurut Pulau di Indonesia, 2008 dan 2013

Wilayah Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Perkembangan Penduduk Miskin 2008–2013	
	2008	2013	(000)	(%)
Sumatera	2.567,8	2.008,33	-559,47	-21,8
Jawa	8.559,3	6.996,12	-1.563,18	-18,3
Bali dan Nusa Tenggara	794,8	601,31	-193,49	-24,3
Kalimantan	364,3	247,45	-116,85	-32,1
Sulawesi	387,4	348,27	-39,13	-10,1
Papua dan Maluku	94,8	124,05	29,25	30,9
Indonesia	12.768,5	10.325,53	-2.442,97	-19,1

Sumber: BPS (2008, 2014b), diolah

Perkembangan penduduk miskin di wilayah perdesaan secara agregat menunjukkan penurunan yang sama dengan di wilayah perkotaan (Tabel 3), walaupun penurunannya lebih besar dibanding di wilayah perkotaan. Baik secara absolut maupun relatif penurunan penduduk miskin di wilayah perdesaan Pulau Jawa terbesar di antara wilayah pulau besar di Indonesia. Hal yang sama seperti yang ditemukan di wilayah perkotaan, di wilayah perdesaan Maluku dan Papua perkembangan penduduk miskin selama kurun tahun 2008–2013 meningkat, walaupun peningkatannya lebih rendah dibanding wilayah perkotaan di wilayah ini. Hal ini sangat kontradiktif mengingat potensi sumber daya alam di wilayah tersebut cukup baik dengan penduduk desa yang mayoritas berpenghasilan dari pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian secara luas belum bisa menopang kehidupan petaninya. Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa kultur sosial masyarakat (terutama Papua) juga berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah ini.

Sementara itu, gambaran agregat antarwilayah pulau disajikan pada Tabel 4. Bila diurut dari besarnya persentase penurunan masing-masing wilayah menunjukkan bahwa Kalimantan menunjukkan urutan pertama diikuti oleh Jawa, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Sumatera. Namun demikian, bila dilihat secara absolut penurunan jumlah penduduk miskin terbesar ditemukan di Jawa, kemudian Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Kalimantan. Disparitas tersebut juga terkait dengan kepadatan penduduk antarwilayah, di mana

Pulau Jawa merupakan pulau terpadat penduduknya dibanding pulau lainnya, sehingga kebijakan perpindahan penduduk melalui program transmigrasi relevan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk memetakan wilayah mana yang berpotensi dan berpeluang untuk bisa dijadikan wilayah transmigrasi, demikian pula halnya penduduk di wilayah mana (kantong kemiskinan) yang perlu dipindahkan dalam rangka mengurangi kemiskinan. Diharapkan program tersebut dapat mengurangi disparitas penduduk miskin antarwilayah pulau di Indonesia.

Tabel 3. Perkembangan Penduduk Miskin Wilayah Perdesaan Menurut Pulau di Indonesia, 2008 dan 2013

Wilayah Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Perkembangan Penduduk Miskin	
	2008	2013	(000)	(%)
Sumatera	4.726,1	4.111,09	-615,01	-13,0
Jawa	11.416,5	8.365,75	-3.050,75	-26,7
Bali dan Nusa Tenggara	1.600,0	1.385,60	-214,40	-13,4
Kalimantan	849,8	678,21	-171,59	-20,2
Sulawesi	2.221,2	1.677,51	-543,69	-24,5
Papua dan Maluku	1.381,2	1.522,87	141,67	10,3
Indonesia	22.194,8	17.741,03	-4.453,77	-20,1

Sumber: BPS (2008, 2014b), diolah

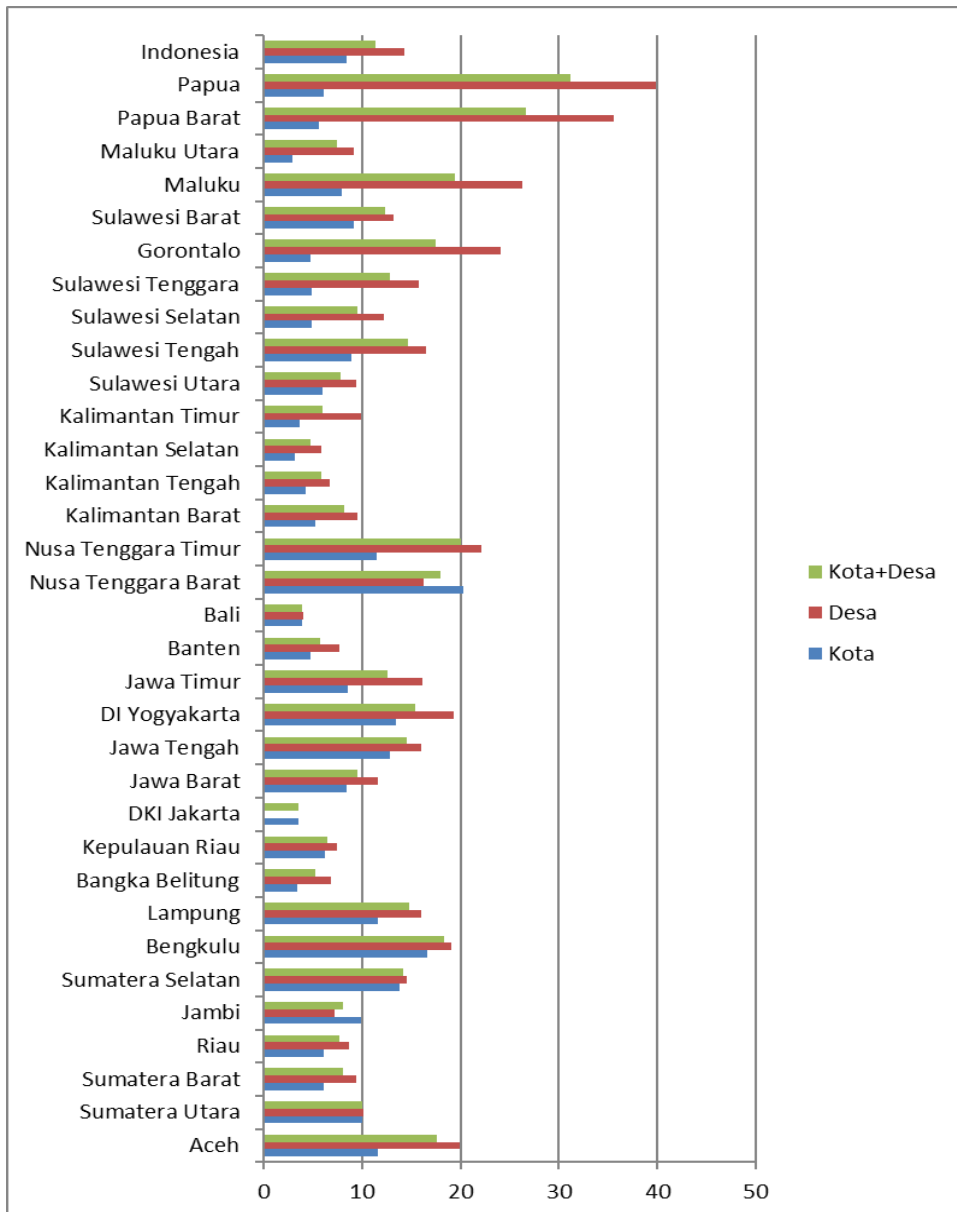
Tabel 4. Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia, 2008 dan 2013

Wilayah Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Perkembangan Penduduk Miskin	
	2008	2013	(000)	(%)
Sumatera	7.294,00	6.119,42	-1.174,58	-16,1
Jawa	19.975,90	15.361,87	-4.614,03	-23,1
Bali dan Nusa Tenggara	2.394,60	1.986,91	-407,69	-17
Kalimantan	1.214,10	925,66	-288,44	-23,8
Sulawesi	2.608,50	2.025,78	-582,72	-22,3
Papua dan Maluku	1.476,00	1.646,92	170,92	11,6
Indonesia	34.963,30	28.066,56	-6.896,74	-19,7

Sumber: BPS (2008, 2013), diolah

Mengingat kepadatan penduduk antarwilayah provinsi di Indonesia, maka untuk melihat kondisi kemiskinan antarwilayah provinsi secara relatif dapat dilihat pada Gambar 2. Untuk wilayah kota Provinsi Nusa Tenggara Barat menduduki urutan pertama yakni mencapai 20,28%, sedangkan persentase penduduk miskin sekitar 10–19,9% di antaranya adalah Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Aceh;

sementara tiga provinsi terendah adalah Maluku Utara, Kalimantan Selatan, dan Bangka Belitung.



Sumber: BPS (2014b)

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Wilayah di Indonesia, 2013

Di wilayah perdesaan, persentase penduduk miskin yang tinggi (>20%) adalah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan persentase jumlah penduduk miskin tiga provinsi terbaik adalah Bali, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Secara agregat nasional persentase penduduk miskin masih tinggi, sedangkan provinsi yang menduduki urutan ketiga terbesar adalah Papua (31,19%), Papua Barat (26,7%), dan Nusa Tenggara Timur (20,03%). Ketiga provinsi tersebut merupakan wilayah Kawasan Indonesia Timur (KTI) yang selama ini merupakan daerah tertinggal, sehingga percepatan pembangunan wilayah ini terus dilakukan. Secara agregat nasional untuk mencapai target MDGs dari indikator jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 7,55%, diperkirakan masih belum bisa tercapai pada tahun 2015, mengingat data empiris menunjukkan bahwa pada tahun 2011 jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan mencapai 12,49% (Bappenas, 2012). Paradigma baru pembangunan global ke depan sebagai koreksi dan kelanjutan dari MDGs, yaitu paradigma *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berlaku sampai dengan 2030 ke depan, dapat digunakan sebagai pedoman.

KARAKTERISTIK WILAYAH DAN PENDUDUK MISKIN

Dalam membahas kemiskinan, harus mengetahui karakteristik kemiskinan baik dari sisi wilayah maupun penduduk atau rumah tangga yang bersangkutan. Di Indonesia kriteria penduduk miskin menggunakan indikator ekonomi yang dilakukan oleh BPS. Selain itu, kemiskinan juga dapat ditunjukkan dari sisi kondisi sosial masyarakat. Menurut Rusastra dan Napitupulu (2008) karakteristik wilayah miskin umumnya adalah lahan kering dengan kompleksitas permasalahan lahan teknis, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, dikatakan bahwa karakteristik dan profil wilayah dan keluarga miskin dinilai penting dan strategis dalam konteks pendalaman permasalahan teknis, ekonomi, dan sosial penduduk miskin serta sebagai basis diagnosis dalam perumusan intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan.

Karakteristik demografi penduduk dan tingkat pendidikan merupakan indikator sosial. Data empiris (Tabel 5) menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah 4,64 orang pada tahun 2008, sedangkan tahun 2013 justru rata-rata lebih besar yakni 4,89 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana (KB) pada rumah tangga miskin belum berdampak pada kinerja jumlah anak mereka.

Tabel 5. Karakteristik Demografi Rumah Tangga Miskin di Indonesia, 2008–2013

Karakteristik Rumah Tangga	Tahun	
	2008	2013
Rata-rata JART (orang)	4,64	4,89
% Rumah tangga wanita	12,91	13,32
Rata-rata umur KK	48,09	47,60

Sumber: BPS (2008, 2013)

Tingkat pendidikan kepala keluarga (KK) miskin umumnya rendah dan didominasi tidak tamat sekolah dasar (SD) yakni 42,8% pada tahun 2008, bahkan pada tahun 2013 mencapai 43,3%. Rata-rata pendidikan KK pada rumah tangga tidak miskin umumnya lebih tinggi dibanding rumah tangga miskin. Ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan KK dapat memicu kemiskinan.

Dilihat dari sumber penghasilan rumah tangga miskin, tampak bahwa sektor pertanian merupakan sektor dominan yang digeluti oleh rumah tangga miskin, yakni sekitar 54,7% pada tahun 2013. Proporsi ini menurun bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2008. Sementara itu, rumah tangga tidak miskin lebih banyak bekerja di sektor lainnya (47,24%), walaupun sumber penghasilan sektor pertanian juga banyak ditemukan pada rumah tangga tidak miskin. Namun demikian, mengingat rumah tangga miskin sebagian besar mengandalkan sektor pertanian, maka pembangunan pada sektor pertanian ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Rusastra dan Napitupulu (2008), untuk tujuan pengembangan agribisnis dan akses kesempatan kerja di luar pertanian tingkat pendidikan penduduk miskin dinilai tidak memadai.

Tabel 6. Karakteristik Tingkat Pendidikan dan Sumber Penghasilan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Indonesia, 2008–2013

Indikator	Rumah Tangga Miskin		Rumah Tangga Tidak Miskin	
	2008	2013	2008	2013
Tingkat Pendidikan KK (%)				
- Tidak tamat SD	42,82	43,30	23,89	23,45
- SD	39,42	36,53	30,19	29,39
- SMP	10,23	12,02	14,75	15,18
- SMA	7,12	7,67	23,32	24,18
- PT	0,41	0,47	7,85	7,80
Sumber Penghasilan RMT (%)				
- Tidak bekerja	10,62	11,90	11,10	11,14
- Pertanian	56,35	54,70	35,05	32,02
- Industri	6,86	6,40	8,70	9,59
- Sektor lainnya	26,16	27,81	45,05	47,24

Sumber: BPS (2008, 2014b)

DINAMIKA KEPARAHAN DAN KEDALAMAN KEMISKINAN

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan atau

poverty gap index (P1) merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan. Nilai P1 berbanding terbalik dengan kondisi kemiskinan, yaitu semakin tinggi P1 semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin, atau kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk (Rusastra dan Napitupulu, 2008).

Pada periode 2003–2013, nilai P1 menunjukkan kecenderungan menurun. Secara agregat nasional nilai P1 selama 2003–2013 mengalami penurunan rata-rata menurun -5,2%. Penurunan nilai lebih cepat di perkotaan (6,18% per tahun) dibanding di perdesaan (3,95%). Laju penurunan nilai P1 pada periode 2009 dibanding periode tahun 2009–2013 (Tabel 7).

Jika jumlah dan proporsi penduduk miskin mengalami perlambatan penurunan, maka hal yang sebaliknya terjadi pada indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Kecenderungan ini mengindikasikan hal yang positif di mana tingkat kesenjangan dan intensitas kemiskinan di antara masyarakat miskin mengalami penurunan, atau terjadi ‘pemerataan perbaikan kehidupan’ di antara masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa P1 secara agregat nasional (desa+kota) mengalami percepatan penurunan dari 1,66%/tahun (2003–2008) menjadi 8,50%/tahun dalam periode 2009–2013.

Tabel 7. Perkembangan Tingkat Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan di Indonesia, 2007–2013 (%)

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2003	2,55	3,53	3,13	0,74	0,93	0,85
2004	2,18	3,43	2,89	0,58	0,90	0,78
2005	2,05	3,34	2,78	0,60	0,89	0,76
2006	2,61	4,22	3,43	0,77	1,22	1,00
2007	2,15	3,78	2,99	0,57	1,09	0,84
2008	2,07	3,42	2,77	0,56	0,95	0,76
2009	1,91	3,05	2,50	0,52	0,82	0,68
2010	1,57	2,80	2,21	0,40	0,75	0,58
2011	1,52	2,63	2,08	0,39	0,70	0,55
2012	1,40	2,36	1,88	0,36	0,59	0,47
2013	1,25	2,24	1,75	0,31	0,56	0,43
Tkt pert. 2003–2008	-2,90	0,19	-1,66	-3,51	1,85	-0,95
Tkt pert. 2009–2013	-9,90	-7,40	-8,50	-11,79	-9,00	-10,73
Tkt pert. 2003–2013	-6,18	-3,95	-5,20	-7,19	-4,04	-5,82

Sumber: BPS (2014a)

Dalam lima tahun terakhir ini (2009–2013) penurunan P1 di perdesaan nampak lebih lambat dibandingkan dengan di daerah perkotaan (7,40% vs 9,90%/tahun). Pada tahun 2013 indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan nampak lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan (2,24 vs 1,25), yang menunjukkan bahwa dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengurangi kesenjangan di antara masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

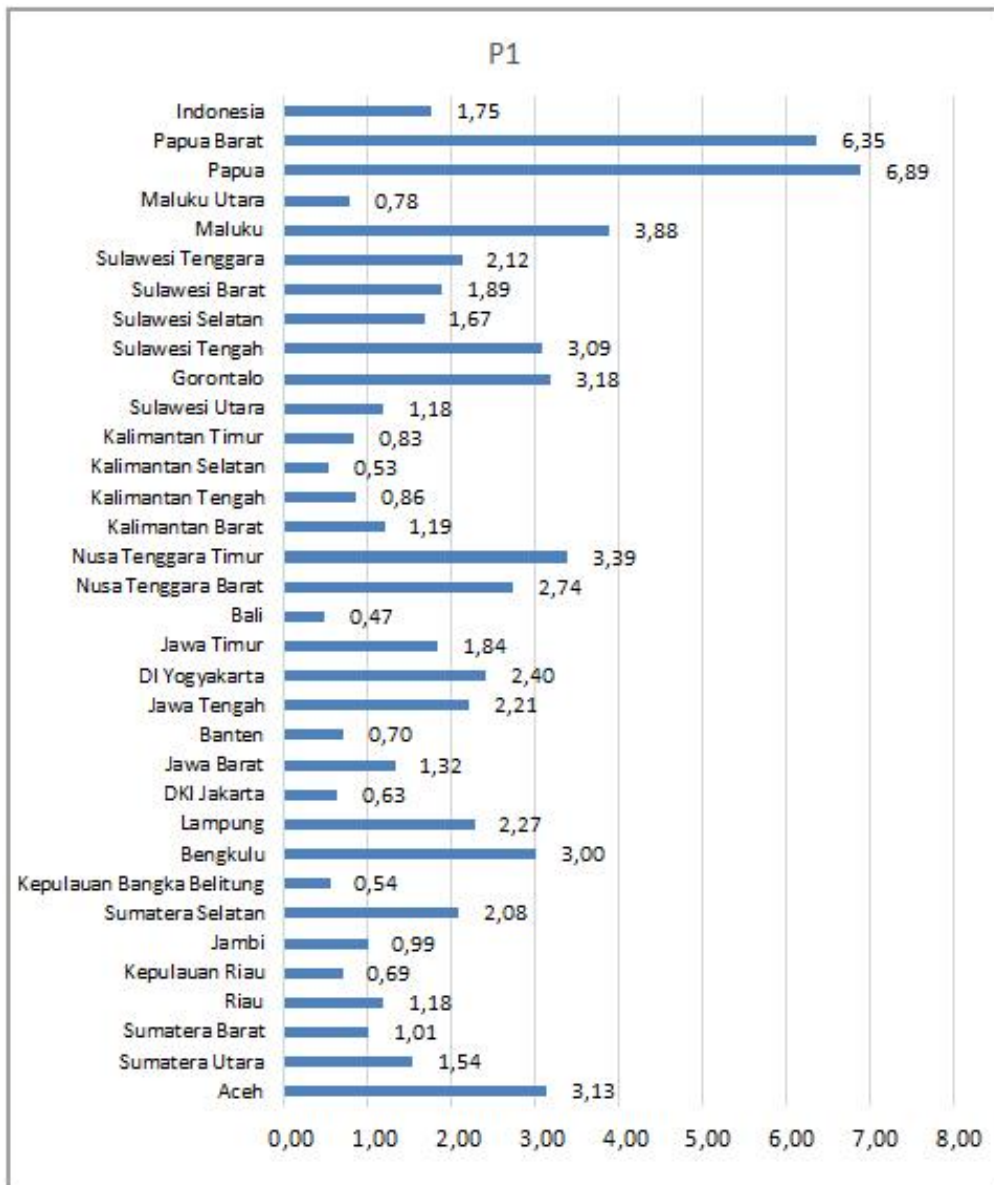
Kecenderungan yang sama juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan (P2), dengan percepatan penurunan yang relatif besar pada lima tahun terakhir dengan laju 10,73%/tahun (agregat nasional). Percepatan penurunan di perdesaan nampak lebih lambat dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu 9,00% vs 11,79%/tahun (Tabel 7). Pada tahun 2013 nilai P2 di daerah perdesaan nampak lebih besar dibandingkan dengan perkotaan, yaitu 0,56 vs 0,31. Secara tersirat nampak bahwa program pengentasan kemiskinan (khususnya di perkotaan) dapat memberikan manfaat positif yang lebih besar bagi masyarakat miskin strata paling bawah (*the poorest among the poor*) untuk memperbaiki taraf hidupnya, namun upaya yang lebih baik perlu diupayakan untuk masyarakat miskin perdesaan

Nilai P1 di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan (2,24 vs 1,25), demikian pula dibandingkan agregat nasional nilai P1 lebih tinggi di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di desa lebih terpuruk dibanding di kota.

Indeks keparahan kemiskinan atau *distributional sensitive index* (P2) menunjukkan penyebaran pengeluaran penduduk miskin dan dapat mengukur tingkat intensitas kemiskinan. Secara agregat nasional nilai P2 menunjukkan 0,43 pada tahun 2013. Kondisi di wilayah perdesaan lebih buruk dibanding di kota dilihat dari nilai P2 konsisten lebih tinggi dibanding di kota selama periode tahun 2003–2013 (Tabel 7). Secara umum penurunan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Bila bicara *poverty gap index* (P1) menurut wilayah provinsi di Indonesia masih terdapat disparitas antarprovinsi. Sesuai dengan persentase penduduk miskin yang tinggi, nilai P1 di Provinsi Papua dan Papua Barat menduduki urutan pertama dan kedua terbesar, masing-masing dengan nilai P1 sebesar 6,89 (Papua) dan 6,35 (Papua Barat). Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin di wilayah tersebut dengan tingkat kesenjangan relatif tinggi dan jauh dari garis kemiskinan wilayah yang bersangkutan. Namun, bila dilihat perkembangannya (2007-2013), nilai P1 di wilayah tersebut semakin baik (BPS, 2014b). Gambar 3 menunjukkan disparitas P1 antarwilayah provinsi di Indonesia, sementara nilai P2 menunjukkan kecenderungan yang sama dengan nilai P1 (Gambar 4).

Pada Gambar 3, dapat dijelaskan bahwa tiga besar provinsi dengan nilai P1 terendah ditemukan di Provinsi Bali (0,47), Kalimantan Selatan (0,53), dan Bangka Belitung (0,54). Semakin rendah nilai P1 menunjukkan kondisi yang baik, artinya bila terjadi penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

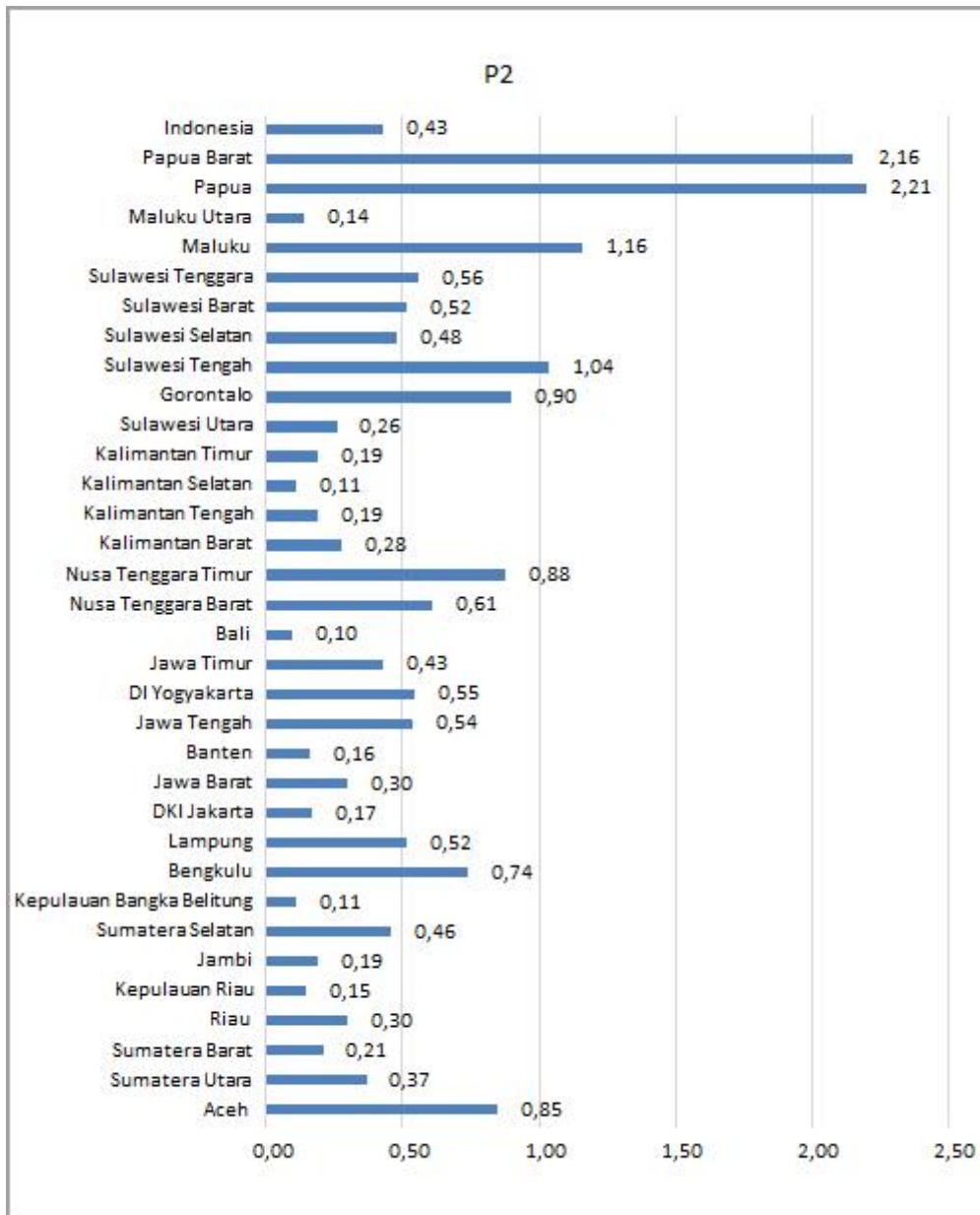


Sumber: BPS (2014b)

Gambar 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi di Indonesia, 2013

Sementara itu, nilai P2 menunjukkan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Besaran nilai P2 dapat memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh kasus, beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan tinggi, tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah; sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden

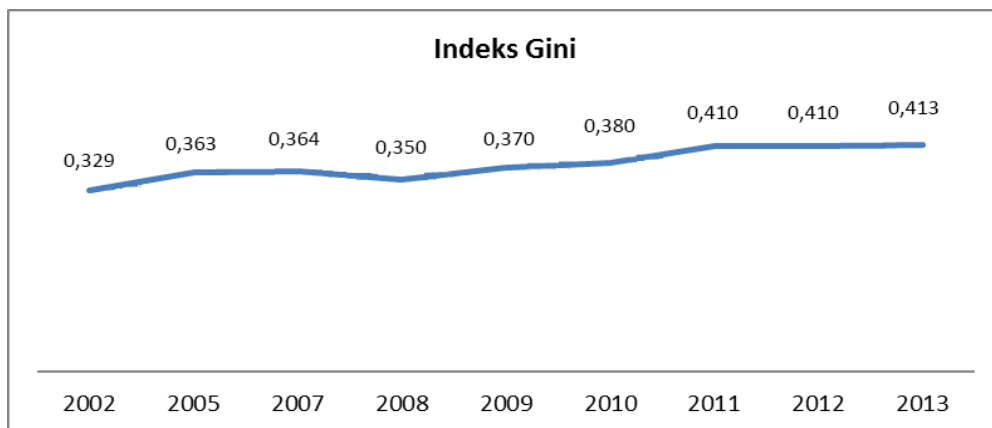
kemiskinan yang rendah, tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin (BPS, 2014b). Berdasarkan analisis data empiris, diketahui bahwa secara umum tingginya insiden kemiskinan juga diikuti oleh tingginya nilai P2. Hal ini berlaku untuk semua wilayah provinsi di Indonesia.



Sumber: BPS (2014b)

Gambar 4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi di Indonesia, 2013

Indeks Gini dari pendapatan (yang diproksi dari pengeluaran) merupakan ukuran untuk melihat kesenjangan dari pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi mendekati angka 1 berarti kesenjangan semakin melebar, sebaliknya semakin mendekati nilai 0 berarti semakin merata. Secara agregat nasional nilai indeks Gini semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan rumah tangga semakin melebar (Gambar 5).



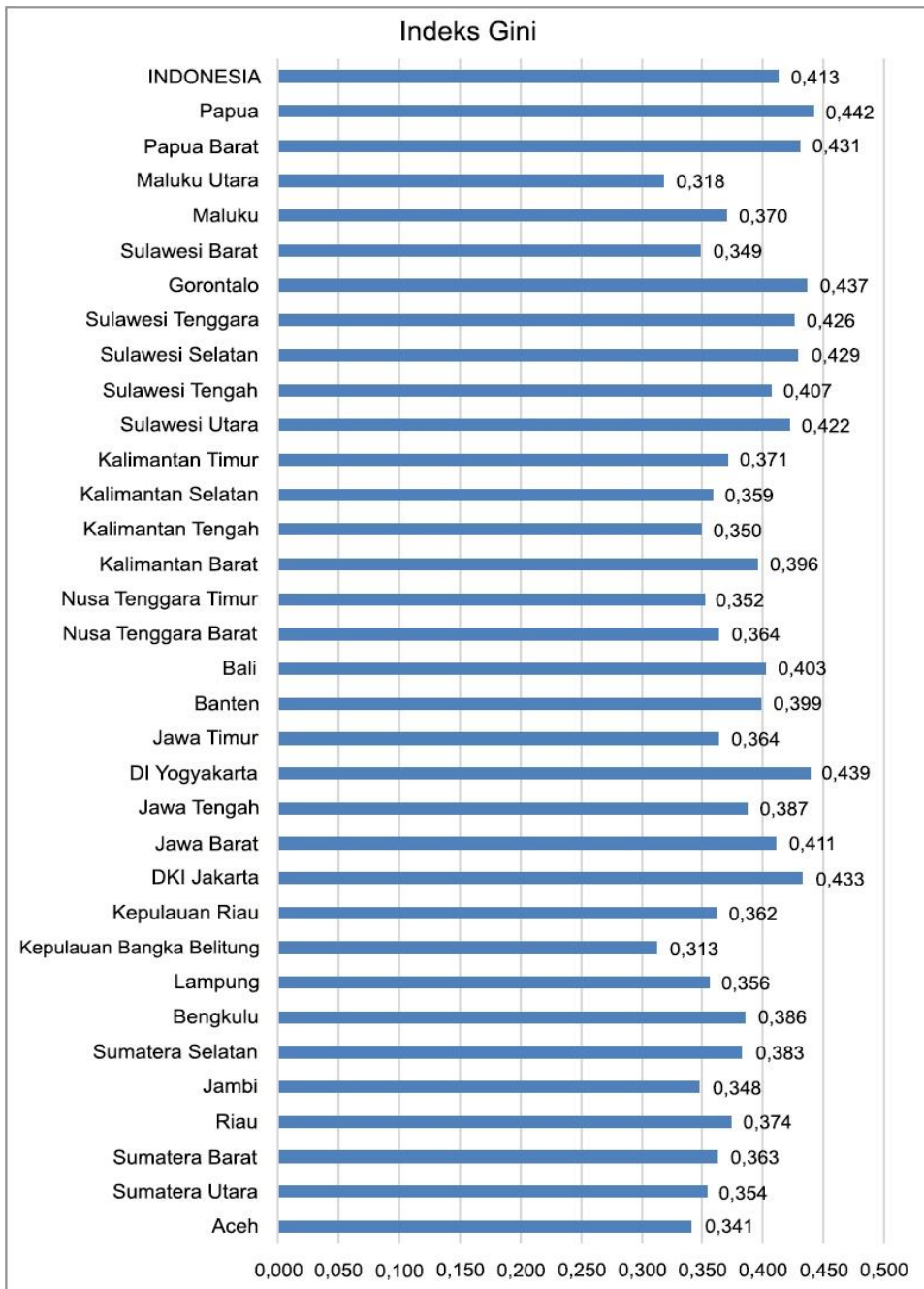
Sumber: BPS (2014c)

Gambar 5. Indeks Gini Pendapatan Penduduk Indonesia, 2002–2013

Di wilayah perdesaan, lahan berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga petani (dalam hal ini pendapatan dari usaha tani) lewat luasnya dan atau kesuburannya (Purwoto *et al.*, 2011). Lebih lanjut dikemukakan bahwa indikator tidak langsung tingkat pendapatan rumah tangga petani sebagai representasi tingkat kesejahteraan yang berkaitan dengan lahan adalah distribusi pemilikan/penguasaan lahan yang diukur dengan indeks Gini. Oleh karena itu, apabila indeks Gini penguasaan lahan mendekati 1 maka secara tidak langsung akan diperoleh gambaran bahwa distribusi tingkat pendapatan (paling tidak pendapatan dari usaha tani lahan dominan) sebagai representasi tingkat kesejahteraan juga akan mengalami ketimpangan berat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di perdesaan berbasis pertanian ketidakmerataan pendapatan rumah tangga berkaitan erat dengan ketidakmerataan penguasaan lahan pertanian (Nurmanaf, 2001), sehingga ketimpangan penguasaan lahan akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, yang akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat perdesaan.

Indeks Gini pendapatan di masing-masing provinsi pada kondisi tahun 2013 ditunjukkan pada Gambar 6. Tampak bahwa nilai indeks Gini tiga terbesar berada di Provinsi Papua (0,442), Daerah Istimewa Yogyakarta (0,439), dan Gorontalo (0,437). Tiga terendah adalah Provinsi Bangka Belitung (0,313), Maluku Utara (0,318), dan NAD (0,341). Secara keseluruhan nilai indeks Gini antarprovinsi mengalami peningkatan (Tabel 8). Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa selama tahun 2007–2013 ketimpangan pendapatan rumah tangga di Indonesia

semakin melebar. Beberapa provinsi yang menunjukkan besaran indeks Gini yang makin menurun selama tahun 2007–2013, antara lain adalah Provinsi NAD, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, dan Jawa Timur.



Sumber: BPS (2014b), diolah

Gambar 6. Indeks Gini Pendapatan Penduduk Menurut Provinsi Indonesia, 2013

Tabel 8. Rataan dan Laju Pertumbuhan Indeks Gini Pendapatan Penduduk di Indonesia Menurut Provinsi, 2007–2013

No.	Provinsi	Rata-Rata	Laju Pertumbuhan (%/tahun)
1.	Aceh	0,30	-0,13
2.	Sumatera Utara	0,33	2,52
3.	Sumatera Barat	0,33	3,05
4.	Riau	0,35	1,61
5.	Jambi	0,31	-1,12
6.	Sumatera Selatan	0,34	4,67
7.	Bengkulu	0,35	2,78
8.	Lampung	0,36	-1,88
9.	Kepulauan Bangka Belitung	0,29	-1,16
10.	Kepulauan Riau	0,32	0,97
11.	DKI Jakarta	0,38	5,69
12.	Jawa Barat	0,38	5,03
13.	Jawa Tengah	0,35	1,95
14.	DI Yogyakarta	0,40	5,48
15.	Jawa Timur	0,35	-2,17
16.	Banten	0,38	1,27
17.	Bali	0,37	20,36
18.	Nusa Tenggara Barat	0,35	18,70
19.	Nusa Tenggara Timur	0,36	16,71
20.	Kalimantan Barat	0,36	21,08
21.	Kalimantan Tengah	0,31	19,59
22.	Kalimantan Selatan	0,36	17,62
23.	Kalimantan Timur	0,36	18,57
24.	Sulawesi Utara	0,36	21,72
25.	Sulawesi Tengah	0,36	20,78
26.	Sulawesi Selatan	0,40	19,22
27.	Sulawesi Tenggara	0,39	20,15
28.	Gorontalo	0,41	19,23
29.	Sulawesi Barat	0,33	19,16
30.	Maluku	0,35	19,21
31.	Maluku Utara	0,33	16,01
32.	Papua Barat	0,37	23,02
33.	Papua	0,41	17,94
	Indonesia	0,39	18,87

Sumber: BPS (2014b), diolah

Catatan: Berdasarkan Susenas Maret

KINERJA DAN PROSPEKTIF PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diimplementasikan baik Program Bantuan Sosial yang berbasis keluarga, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat, dan Program Pemberdayaan Berbasis UMKM. Untuk memenuhi target angka kemiskinan menjadi 8–10% pada tahun 2014, Pemerintah RI kemudian mengambil kebijakan untuk mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan berbagai pendekatan, dimulai dari pendekatan kelembagaan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Program perlindungan sosial seperti PKH, BLT, Jamkesmas, Raskin, dan BOS merupakan program utama penanggulangan kemiskinan bersasaran. Meskipun demikian, penetapan sasaran masih memerlukan penyempurnaan agar efektivitas program dapat ditingkatkan. Kurang efektifnya program penanggulangan kemiskinan bersasaran antara lain disebabkan berbagai program menggunakan pendekatan penargetan dan database penerima manfaat program yang berbeda sehingga masih terjadi kesalahan inklusif (*inclusive error*) dan kesalahan eksklusif (*exclusive error*) yang cukup besar. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan penargetan untuk memperbaiki kinerja program melalui Unifikasi Sistem Penargetan Nasional (TNP2K, 2013).

Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin

Prioritas jangka pendek–menengah dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan bantuan kesehatan untuk keluarga miskin meliputi (1) perumusan dan penentuan lembaga penyelenggara jaminan kesehatan yang tepat; (2) pengkajian struktur biaya kesehatan bagi masyarakat miskin; (3) penetapan paket benefit; (4) penyusunan rencana kerja yang rasional termasuk penghitungan biaya yang dibutuhkan.

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, sehingga berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan MGD's yang akan terbantu oleh PKH adalah pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender,

pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.

Melihat begitu besarnya manfaat Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer*), pemerintahan SBY-Boediono menargetkan PKH pada akhir tahun 2014 sudah dapat dinikmati oleh seluruh RTSM di Indonesia yang jumlahnya berkisar antara 3 juta keluarga. Untuk itu, sejak saat ini dilakukan berbagai penyempurnaan untuk memastikan bahwa PKH dilaksanakan sebagai program *Conditional Cash Transfer*.

Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat ke dalam PNPM

Prioritas jangka pendek-menengah dalam kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat adalah mengintegrasikan PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan dan fasilitas pembiayaan, meliputi (1) integrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya ke dalam PNPM Mandiri; (2) peningkatan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM Mandiri; (3) integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan; dan (4) integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan di luar APBN/APBD.

Program Nasional Keuangan Inkusif

Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik merupakan salah satu prasyarat berhasilnya pembangunan ekonomi dan sosial yang menjangkau setiap komunitas individu. Pasar dan institusi keuangan memainkan peran penting dalam menyalurkan dana ke kegiatan ekonomi yang paling produktif serta mengalokasikan risiko ke pelaku ekonomi yang paling siap untuk menanggungnya. Dengan demikian, mereka berperan dalam mengatasi dampak negatif dari ketidakseimbangan informasi serta biaya transaksi merupakan dua penyebab klasik kegagalan pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan dan kemakmuran, serta mengurangi kemiskinan. Melihat pentingnya sektor keuangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, TNP2K diberikan mandat untuk melakukan langkah-langkah guna meningkatkan komitmen pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat umum dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif.

PARADIGMA DAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN

Harmonisasi Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan

Pemahaman dan implementasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang juga dikenal dengan pembangunan inklusif membutuhkan pembahasan empat aspek terkait secara hirarkhis dari tataran makro, meso, dan mikro, yaitu (a) *triple track strategy* dan pertumbuhan inklusif nasional; (b) pemerataan pembangunan dan konektivitas antarwilayah; (c) pembangunan perdesaan dan integrasi ekonomi

desa-kota; dan (d) integrasi pemberdayaan kelompok miskin dan pembangunan perdesaan.

Dalam perspektif pengentasan kemiskinan, pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini adalah *triple track strategy* (*pro-poor, pro-job, dan pro growth*) tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan. Pendekatan pembangunan ini pada hakekatnya adalah paradigma pertumbuhan inklusif dengan mengedepankan pembangunan prokelompok miskin dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi (dan kesempatan kerja) serta mencegah kerusakan lingkungan (Rusastra dan Erwidodo, 1998). Paradigma pertumbuhan inklusif dan berkualitas dapat dilaksanakan pada tataran nasional, wilayah, dan perdesaan yang dikomplemen dengan integrasi dan harmonisasi antara pertumbuhan dan pemerataan sehingga tercipta konvergensi produktivitas antarwilayah, antarsektor, dan kelompok masyarakat.

Komponen dasar pertumbuhan inklusif dan berkualitas mencakup tiga aspek, yaitu (a) sinergi pengembangan sumber daya manusia dan program pembangunan; (b) pendekatan pembangunan dan pemberdayaan secara holistik; dan (c) transformasi struktural ekonomi pertanian dan perdesaan (Rusastra, 2010). Dalam konteks ini dibutuhkan pengembangan kapasitas kelompok miskin (bahkan secara individual) sehingga mampu mengakses dan mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Peningkatan kesejahteraan kelompok miskin ditentukan oleh kemampuan pengambilan keputusan individu/kelompok, penguasaan aset, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka kuasai. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan secara holistik. Partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan, implementasi kebijakan dan program turut menentukan keberhasilan pembangunan. Dalam perspektif pengentasan kemiskinan, pembangunan perdesaan perlu didukung oleh transformasi struktural ekonomi pertanian dan perdesaan. Prinsip dasarnya adalah pemanfaatan teknologi terbarukan, investasi pendidikan, penurunan biaya transaksi, dan peningkatan efisiensi alokasi sumber daya (Timmer, 2006). Sasaran akhirnya adalah konvergensi produktivitas tenaga kerja dan kapital antara sektor pertanian/perdesaan dan sektor nonpertanian/perkotaan melalui perbaikan integrasi ekonomi desa-kota (Rusastra dan Bottema, 2008).

Pada tataran meso, pendekatan pertumbuhan inklusif dapat diterapkan dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah. Fokusnya di sini adalah pembangunan daerah miskin dan tertinggal dengan tetap mempertahankan pertumbuhan pada daerah potensial yang dikomplemen dengan membangun konektivitas ekonomi melalui pengembangan infrastruktur fisik dan kelembagaan. Pada tataran mikro perdesaan, seperti disebutkan di atas adalah pengembangan integrasi ekonomi desa-kota dalam perspektif percepatan pemerataan pembangunan yang direfleksikan oleh konvergensi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pada tataran mikro rumah tangga petani dibutuhkan peningkatan kapasitas dan akses kelompok afinitas rumah tangga miskin dengan pembangunan perdesaan. Dalam konteks ini dibutuhkan harmonisasi dan integrasi antara program pemberdayaan kelompok miskin dan pembangunan ekonomi

perdesaan. Kesempatan kerja dan berusaha yang paling mudah diakses oleh rumah tangga miskin adalah kesempatan yang ada di tingkat desa.

Harmonisasi pertumbuhan dan pemerataan juga dapat dikemukakan secara sekuensial mikro, meso, makro nasional. Pada tataran mikro, pembangunan perdesaan inklusif mensyaratkan sinergi pertumbuhan di tingkat desa dengan program pemberdayaan kelompok miskin. Pengembangan agroindustri dapat dijadikan instrumen program pemberdayaan, pembangunan perdesaan, dan percepatan transformasi ekonomi perdesaan (Rusastra, 2010). Dalam perspektif pengembangan ekonomi wilayah (tataran meso) dan peningkatan efektivitas pembangunan dibutuhkan fokus pada pembangunan perdesaan miskin melalui optimalisasi alokasi sumber daya ekonomi dalam mendukung gerakan pengentasan kemiskinan. Secara paralel pada tingkat nasional (tataran makro), pemerintah dan masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur, investasi, dan iklim ekonomi yang kondusif. Optimalisasi alokasi dana pembangunan untuk program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat lokal, wilayah, dan nasional akan dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan di perdesaan dan secara nasional (Rusastra, *loc. cit.*).

Kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional

Dalam perspektif pengentasan kemiskinan, bahasan kebijakan pembangunan pertanian nasional mencakup (a) justifikasi peran sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan nasional dan perdesaan; (b) pengentasan kemiskinan melalui revitalisasi sektor pertanian; (c) pembangunan kemandirian dan kedaulatan pangan untuk pengentasan petani dari kemiskinan; dan (d) pembangunan agribisnis dan agroindustri sebagai strategi pengentasan kemiskinan.

Terdapat empat alasan utama terkait pentingnya peran sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan, yaitu mendorong pertumbuhan PDB, mendorong pertumbuhan sektor nonpertanian, meningkatkan kesempatan kerja dan tingkat upah, dan menyediakan pangan dengan harga terjangkau (Sudaryanto, 2009). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan sudah terbukti positif, khususnya pertumbuhan sektor pertanian melalui keberhasilan intensifikasi pertanian tanaman pangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan bila didukung oleh pemerataan pendapatan yang lebih baik. Pertumbuhan sektor pertanian memberikan dampak yang lebih besar terhadap pemerataan melalui peningkatan pendapatan penduduk miskin yang sebagian besar tinggal di perdesaan.

Pertumbuhan sektor pertanian juga berdampak terhadap pertumbuhan sektor nonpertanian melalui kegiatan produksi, konsumsi, dan pasar input, yang pada akhirnya juga berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Kontribusi pendapatan nonpertanian dalam struktur pendapatan rumah tangga petani kecil dan tunakisma adalah relatif tinggi, yaitu 46,5% dan 60,0% (Susilowati *et al.*, 2008), sehingga dampak penggandanya berperan besar dalam pengentasan kemiskinan.

Bagi petani dan buruh tani kesempatan kerja dan tingkat upah sektor pertanian dan nonpertanian memegang peran penting sebagai sumber pendapatan. Kedua subsektor ini di perdesaan berperan penting sebagai *buffer* dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan dan akhirnya terhadap pengentasan kemiskinan. Bagi penduduk miskin, pengeluaran pangan menempati posisi dominan dalam struktur pengeluaran rumah tangga dan juga dalam besaran garis kemiskinan. Keberhasilan pembangunan pertanian melalui peningkatan produksi pangan pokok dan kebijakan stabilisasi harga pangan akan menjamin ketersediaan dan akses pangan (harga pangan terjangkau) bagi penduduk berpendapatan rendah (Apriyantono, 2009).

Kebijakan revitalisasi sektor pertanian dalam perspektif percepatan pengentasan kemiskinan perdesaan yang patut dipertimbangkan adalah (a) pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan; (b) peningkatan akses terhadap penguasaan aset produktif; (c) diversifikasi usaha tani komoditas bernilai ekonomi tinggi; (d) penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan; dan (e) kebijakan dan program yang ditargetkan untuk penduduk miskin (Sudaryanto, 2009). Ketiga aspek pertama memiliki keterkaitan yang kuat. Pengembangan infrastruktur fisik yang memadai (jalan desa, jalan usaha tani, irigasi) akan berperan positif dalam aktualisasi daya-guna sumber daya pertanian (khususnya lahan dan teknologi) dalam peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing komoditas pertanian. Perbaikan infrastruktur juga berperan positif dalam perbaikan efisiensi pasar sarana produksi dan pasar output pertanian, sehingga berperan positif dalam pengembangan diversifikasi dan hilirisasi usaha pertanian, termasuk pengembangan usaha tani komoditas bernilai ekonomi tinggi. Pada saat bersamaan penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan akan meningkatkan daya tawar ekonomi dan masyarakat perdesaan. Penguatan ekonomi pertanian dan perdesaan merupakan syarat penting bagi pengentasan kemiskinan melalui integrasinya dengan pemberdayaan kelompok miskin dengan adanya program pemberdayaan pengentasan kemiskinan. Kebijakan dan program pembangunan pertanian dengan orientasi pengentasan kemiskinan patut mempertimbangkan intensitas tingkat kemiskinan, potensi dan karakteristik pertanian, karakteristik masyarakat tani, dan sistem insentif pengembangan pertanian.

Penerapan program ketahanan pangan dengan tetap mengandalkan impor pangan, selama hampir enam dekade, ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan keluar dari perangkap kemiskinan (Swastika, 2010). Kebijakan antisipatif yang dinilai prospektif adalah membangun kemandirian dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal yang ditopang oleh pengembangan agroindustri, skim kredit lunak, dan pengembangan infrastruktur di perdesaan. Beberapa kebijakan operasional yang perlu dipertimbangkan adalah (a) optimalisasi sumber pertumbuhan produksi dan sumber daya hayati pada berbagai agroekosistem; (b) membangun sistem pertanian korporasi dan kemitraan petani dengan perusahaan industri pertanian; (c) pembangunan perdesaan terpadu melalui pengembangan agroindustri, eliminasi ekonomi biaya tinggi, peningkatan ketersediaan dan akses sumber daya kapital, peningkatan kapasitas pertanian, pengembangan infrastruktur fisik dan kelembagaan, serta kebijakan perdagangan yang kondusif bagi pembangunan pertanian dan perdesaan.

Kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan dalam pengentasan kemiskinan mencakup tiga dimensi (Rusastra, 2010), yaitu (a) kebijakan pengembangan usaha tani skala kecil; (b) kebijakan peningkatan daya saing komoditas pertanian; dan (c) pembangunan perdesaan berlandaskan agribisnis. Pemberdayaan usaha tani skala kecil tidak dapat dilepaskan dari pembangunan perdesaan inklusif, melalui restrukturisasi agribisnis dan peningkatan daya saing. Operasionalisasi pembangunan agribisnis berdaya saing dalam pengentasan kemiskinan membutuhkan dukungan paket kebijakan yang meliputi tujuh komponen utama (Rusastra *et al.*, 2002), yaitu (a) pembangunan infrastruktur perdesaan dengan sasaran peningkatan produktivitas dan efisiensi; (b) pengembangan sistem inovasi pertanian dengan sasaran peningkatan kapasitas produksi, produktivitas dan nilai tambah; (c) pengembangan SDM dan kelembagaan petani melalui pembentukan organisasi petani dan aliansinya dengan pelaku agribisnis lainnya; (d) optimasi sumber daya berkelanjutan dengan sasaran menjaga keberlanjutan kapasitas produksi, peningkatan produktivitas, dan daya saing; (e) konsolidasi vertikal agribisnis melalui konsolidasi usaha tani skala kecil dengan mitra usaha dengan prinsip dasar saling menguntungkan; (f) pemacuan investasi sektor agribisnis dengan fasilitasi pemerintah, khususnya kredit investasi jangka panjang dan lingkungan ekonomi yang kondusif; dan (g) rasionalisasi kebijakan subsidi dan proteksi pengembangan agribisnis dengan mempertimbangkan multifungsi pertanian dan kebijakan negara lain.

Pengembangan agribisnis nasional ke depan perlu mempertimbangkan konteks proyeksi pengembangan agribisnis global. Proyeksi berbagai lembaga internasional (FAO, IFPRI, FAPRI, IPCC, OECD) menyebutkan bahwa terdapat empat variabel penting yang akan menentukan situasi pangan global, yaitu pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, urbanisasi, substitusi energi fosil dengan biofuel, dan perubahan iklim global (Saragih, 2010). Diperkirakan sekitar 75% dari 5,0 miliar penduduk negara berkembang akan naik kelas menjadi kelompok berpendapatan menengah/tinggi pada tahun 2050 dan sekitar 75% akan tinggal di perkotaan dengan perubahan preferensi konsumsi. Pengembangan global *biofuel* dan *biofiber* ke depan akan memberikan keuntungan bagi negara berkembang dengan basis pertanian melalui kenaikan harga pangan dan insentif pengembangannya (melalui pengurangan emisi/penyerapan CO₂) dalam mengatasi dampak perubahan iklim global.

Dalam perspektif *feeding the world*, Indonesia perlu melakukan perubahan paradigma dan strategi pembangunan dengan mengedepankan pembangunan ekonomi yang dimotori pembangunan agribisnis (*agribusiness-led-development*) dengan mempertimbangkan empat komponen/subsistem agribisnis secara integratif dan holistik (Saragih, 2010), yaitu (a) pengembangan industri hulu pertanian seperti industri pembibitan, industri pupuk, industri vaksin dan obat-obatan, dan industri alat dan mesin pertanian; (b) pembangunan pertanian (*on-farm agribusiness*) baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; (c) pengembangan industri hasil pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi dan final produk seperti industri makanan dan minuman, industri pakan, industri *biofuel*, industri *biofiber*, dan *food service industry*; dan (d) pengembangan jasa untuk agribisnis seperti perdagangan antardaerah, penelitian

dan pengembangan, pendidikan dan penyuluhan, infrastruktur, perbankan dan asuransi, transportasi dan pergudangan, serta kebijakan pengembangan dari pemerintah (fiskal, moneter, kelembagaan, peraturan daerah, dan tata ruang).

Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan

Bahasan ini mencakup tiga aspek, yaitu (a) paradigma dan strategi pembangunan dan pertumbuhan inklusif yang dinilai mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan; (b) strategi revitalisasi peran sektor pertanian dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan perdesaan; dan (c) strategi membangun kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mengentaskan petani dari kemiskinan melalui pendekatan produksi dan konsumsi yang terintegrasi dengan pembangunan perdesaan secara terpadu.

Program pembangunan dan pengentasan kemiskinan selama ini bersifat parsial sektoral sehingga tidak mampu melakukan percepatan pengentasan kemiskinan secara nasional. Paradigma baru ini menawarkan sinergi dan integrasi pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah dengan pembangunan perdesaan inklusif, program pemberdayaan, dan program bantuan terpadu berbasis rumah tangga (Rusastra, 2010). Reorientasi paradigma ini patut dikomplementasi dengan transformasi ekonomi dalam arti luas, dan menempatkan agribisnis sebagai landasan dan instrumen percepatan transformasi ekonomi pertanian, perdesaan, wilayah, dan nasional.

Dalam perspektif reorientasi paradigma pengentasan kemiskinan tersebut, strategi yang perlu dipertimbangkan (Rusastra, 2010) adalah (a) implementasi pembangunan dan pertumbuhan inklusif secara nasional melalui keberpihakan kebijakan fiskal dan sistem insentif pembangunan pertanian, peningkatan kapasitas produksi nasional dalam perspektif keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, sinergi pertumbuhan inklusif dalam arti luas dengan program pemberdayaan kelompok miskin, dan peningkatan kapasitas dan akses penduduk miskin terhadap kesempatan kerja dan berusaha; (b) memposisikan agribisnis sebagai andalan pembangunan pertanian dan pedesaan melalui konsolidasi kegiatan agribisnis, pengembangan manajemen tunggal dalam pengelolaan agribisnis, pengembangan kemitraan agribisnis konsolidatif, dan pengembangan mata rantai produk agribisnis vertikal sebagai landasan agribisnis berdaya saing; dan (c) akselerasi transformasi struktural perekonomian melalui pemantapan dan perluasan program pemberdayaan kelompok miskin, sinergi program pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi desa, integrasi ekonomi desa-kota, dan percepatan serta perluasan pertumbuhan ekonomi wilayah/nasional.

Strategi revitalisasi peran sektor pertanian dalam akselerasi pengentasan kemiskinan di perdesaan mencakup tiga strategi utama (Sudaryanto, 2009), yaitu (a) akselerasi tingkat pertumbuhan sektor pertanian melalui modernisasi pertanian skala kecil, diversifikasi ke arah komoditas dengan potensi dan nilai ekonomi tinggi, akselerasi inovasi teknologi pertanian, peningkatan akses pasar domestik dan internasional, peningkatan kapasitas produksi pertanian nasional sesuai potensi wilayah, peningkatan kapasitas dan akses penduduk miskin terhadap kesempatan

dan hasil pembangunan pertanian; (b) perluasan dan pengembangan usaha nonpertanian melalui percepatan transformasi ekonomi dan memperluas sumber pendapatan nonpertanian sesuai potensi daerah, dengan prioritas pengembangan agroindustri dan pelayanan jasa sektor pertanian; dan (c) peningkatan sistem perlindungan dan jaring pengaman sosial bagi penduduk miskin.

Strategi pembangunan kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mengentaskan petani dari kemiskinan mempertimbangkan tiga strategi pokok (Swastika, 2010), yaitu (a) peningkatan produksi pertanian melalui optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan produksi; pengembangan pelayahan komoditas sesuai keragaman agroekosistem, komoditas unggulan daerah, dan sumber daya lokal; pengembangan konsolidasi usaha tani dan program kemitraan; peningkatan ketersediaan dan akses sumber daya pertanian bagi petani skala kecil; (b) pengembangan konsumsi pangan melalui dua pendekatan, yaitu revitalisasi program keluarga berencana dan promosi diversifikasi pangan khususnya melalui pengolahan dan promosi bahan pangan lokal olahan nonberas untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan; dan (c) pembangunan perdesaan dan usaha tani terpadu melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT), penerapan sistem integrasi tanaman-ternak, peningkatan pendapatan petani melalui penguatan modal kerja, dan pengolahan hasil pertanian melalui pengembangan agroindustri di perdesaan.

KESIMPULAN

Selama kurun waktu 2003–2013, proporsi penduduk miskin di Indonesia menurun, dengan laju penurunan presentase penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibanding di perdesaan. Masih terdapat disparitas jumlah dan persentase penduduk miskin antarprovinsi di Indonesia, di mana proporsi penduduk miskin paling besar terdapat di Pulau Jawa. Sebagian besar penduduk miskin tersebut bekerja di sektor pertanian.

Analisis kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan menunjukkan penurunan selama periode 2003–2013. Penurunan kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa secara umum rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin kecil.

Program pembangunan dan pengentasan kemiskinan masih bersifat parsial sektoral sehingga tidak mampu melakukan percepatan pengentasan kemiskinan secara nasional. Selain itu, masih sering ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam program pengentasan kemiskinan

Fokus kebijakan pengentasan kemiskinan seyogianya tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin, tetapi mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar mempertimbangkan pendekatan holistik multisektoral dan berbasis wilayah/desa miskin tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi daerah potensial, integrasi

program pemberdayaan kelompok miskin dan pembangunan ekonomi perdesaan (pembangunan perdesaan inklusif), percepatan transformasi ekonomi (desa-kota dan antarwilayah) dengan sasaran konvergensi tingkat produktivitas, dan modernisasi pertanian dan perdesaan. Proporsi penduduk miskin paling tinggi terdapat di Pulau Jawa dan oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan di Jawa harus lebih diperhatikan.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka paradigma pertumbuhan inklusif dan berkualitas dapat dilaksanakan pada tataran nasional, wilayah, dan perdesaan yang dikomplemen dengan integrasi dan harmonisasi antara pertumbuhan dan pemerataan sehingga tercipta konvergensi produktivitas antarwilayah, antarsektor, dan kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyantono, A. 2009. *Toward Sustainable Agriculture and Food Security*. Presented at the Ministerial Roundtable in the 65th Session of the Commission, 27–29 April 2009, Bangkok.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. *Analisis dan Penghitungan dan Tingkat Kemiskinan 2008*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. *Penghitungan dan Analisis Makro Kemiskinan Indonesia Tahun 2013*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014a. *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970–2013*. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494> (29 Agustus 2014).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014b. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2013*. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488> (29 Agustus 2014).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014c. *Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 1996, 1999, 2002, 2005, 2007–2013*. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1493> (29 Agustus 2014).
- Faharuddin. 2012. *Mengukur Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia 2010*. *Jurnal Agroekonomi* 30(2):145–157.
- Nurmanaf, A.R. 2001. *An Analysis of Economic Inequalities between Household in Rural Indonesia*. *Dissertation Findings in Brief*. Faculty of Business and Computing, Southern Cross University, Coffs Harbour Campus. Australia.
- Purwoto, A., I.W. Rusastra, B. Winarso, T.B. Purwantini, A.K. Zakaria, T. Nurasa, D. Hidayat, C. Muslim, dan C.B. Adawiyah. 2011. *Panel Petani Nasional (Patanas): Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Sayuran dan Palawija*. *Laporan Penelitian*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

- Rusastra, IW. 2010. Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Rusastra, IW. dan Erwidodo. 1998. Growth, Equity and Environment Aspect of Agricultural Development in Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 6(1):32–41.
- Rusastra, IW. dan J.W.T. Bottema. 2008. Eradicate Extreme Poverty and Hunger (MDG-1): Performance and Policy for Acceleration the Attainment of National Goal in 2015. *Palawija News* 25(2):5–9.
- Rusastra, IW. dan T.A. Napitupulu. 2008. Karakteristik Wilayah dan Keluarga Miskin di Pedesaan. hlm. 9–22. *Dalam* Y.Yusdja, A.R. Nurmanaf dan I.S. Anugrah (Eds.). *Prosiding Seminar Nasional Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Bogor, 21 Agustus, 2007. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rusastra, IW., P. Simatupang, dan B. Rachman. 2002. Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berlandaskan Agribisnis. *Dalam* T. Sudaryanto *et al.* (Eds.). *Analisis Kebijakan: Pembangunan Pertanian Andalan Berwawasan Agribisnis Monograf Series No. 23*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Saragih, B. 2010. Perkembangan Mutakhir Pasar Agribisnis Global dan Implikasinya bagi Pembangunan Agribisnis Indonesia. Orasi Purnabakti Guru Besar Tetap Departemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sudaryanto, T. 2009. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan: Revitalisasi Peran Sektor Pertanian. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. 52 hlm.
- Susilowati, S.H., Sumaryanto, R.N. Suhaeti, S. Friyatno, H. Tarigan, N.K. Agustin, dan C. Muslim. 2008. Konsorsium Penelitian: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani pada Berbagai Tipe Agroekosistem: Aspek Arah Penguasaan Lahan dan Tenaga Kerja Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor dan Universitas Pajajaran, Bandung.
- Surjono, 2013. Pengukuran Kemiskinan dan Analisisnya. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Swastika, D.K.S. 2010. Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan untuk Mengentaskan Petani dari Kemiskinan. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. 50 hlm.
- Timmer, C.P. 2006. *The Structural Transformation in Historical Perspective: Lessons from Global Patterns and Divergent Country Path*. Center for Global Development. USA.
- [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2013. Program Penanggulangan Kemiskinan. <http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/program-penanggulangan-kemiskinan/> (12 November 2014).
- Umar, M. 2012. Mencari Akar Permasalahan Kemiskinan (Pendahuluan). Hasil Penelitian. <https://musniumar.wordpress.com/2012/06/04/mencari-akar-permasalahan-kemiskinan-pendahuluan-hasil-penelitian/> (29 Desember 2014).